

**STUDI KOMPARATIF PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DAN
MEKANISME PELAKSANAANNYA DI POLANDIA, USA (TEXAS),
DAN INDONESIA DAN KESESUAIANNYA DENGAN *CONVENTION
AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING
TREATMENT OR PUNISHMENT***

Oleh: Shafira Tri Gurnita¹ dan Sri Wiyanti Eddyono²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman kebiri di USA (Texas), Polandia, dan Indonesia, serta kesesuaian hukuman kebiri tersebut menurut *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif-komparatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data kepustakaan dan didukung dengan hasil wawancara narasumber yang relevan. Penelitian komparatif mempelajari objek penelitian dengan menggunakan metode perbandingan. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Hukuman kebiri di USA (Texas) berbentuk kebiri fisik dan bersifat sukarela. Terpidana yang akan menjalani prosedur kebiri harus memenuhi persyaratan tertentu. Hukuman kebiri di Polandia berbentuk kebiri kimia dan bersifat wajib. Tidak ada persyaratan untuk menjalani prosedur kebiri. Hukuman kebiri di Indonesia berbentuk kebiri kimia dan bersifat wajib. Tidak ada persyaratan untuk menjalani prosedur kebiri. Hukuman kebiri di ketiga negara tersebut diterapkan karena banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman ini bukan merupakan persyaratan untuk pembebasan atau pelepasan awal, serta dilaksanakan setelah menjalani pidana penjara. 2) Suatu sanksi yang sah tidak boleh melanggar larangan penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Hukuman kebiri yang tidak melanggar hak asasi manusia untuk disiksa sekaligus tidak melanggar UNCAC harus dijalankan dengan persetujuan dari pelaku, berdasarkan rekomendasi ahli medis, dan diatur secara jelas melalui undang-undang.

Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan, Studi Komparatif.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

COMPARATIVE STUDY OF CASTRATION LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN POLAND, USA (TEXAS), AND INDONESIA AND ITS SUITABILITY WITH CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

By: Shafira Tri Gurnita³ and Sri Wiyanti Eddyono⁴

ABSTRACT

This study aims to compare castration law in Poland, USA (Texas), and Indonesia, as well as the suitability of castration law according to Convention against Torture, and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which then become recommendations for lawmakers in Indonesia in regulating and determining the implementation of castration for the perpetrators of child sexual abuse.

This study is a normative-comparative legal study. Normative study is conducted by reviewing library data and is supported by relevant interviewees. Comparative study studies the objects of research using comparison method. The data obtained are explained and described clearly, and analyzed by qualitative method.

The result and the conclusion obtained from this study are as follows: 1) Castration law in USA (Texas) is a physical castration and voluntary. Perpetrators who will undergo castration procedure must meet certain requirements. Castration law in Poland is a chemical castration and mandatory. There is no requirement to undergo castration procedure. Castration law in Indonesia is a chemical castration and mandatory. There is no requirement to undergo castration procedure. Castration law in these three countries is applied because the many cases of child sexual abuse. This law is not a requirement for a release and is carried out after serving the prison sentence. 2) A legal sanction must not violate the prohibition of torture and ill-treatment. Castration that neither violate human rights to be tortured nor UNCAT must be carried out with the consent of the perpetrator, based on recommendation from medical experts, and clearly regulated by law.

Keywords: Castration Law, Child Sexual Abuse, Convention Against Torture, Comparative Study.

³ Undergraduate Student at Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.